



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **NUNING NUGRAHANI**
- Jabatan : **KEPALA BALAI**
- NHK : **930982**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.050.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 26.45 m2/23 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **145.000.000**

- MOTOR, HONDA VARIO 125 CBS-SS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO RS AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **101.850.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **5.775.500**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **36.315.292**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.338.940.792**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.338.940.792**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : ADE RACHMAT SANTOSA
- Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
- NHK : 407238

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/115 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	12.500.000
1. MOTOR, YAMAHA XEON MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	722.500.000
III. HUTANG	Rp.	565.612.767
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	156.887.233

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : TITIN PARLINA
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK : 134585

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 110.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/80 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 172.000.000

- MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, XENIA 1.3 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000
- MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 293.750.000

III. HUTANG Rp. 125.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 168.750.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : HENING KARTIKA SRI REJEKI S
- Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
- NHK : 487171

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 975.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 207 m²/120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.500.000

- MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, YAMAHA NEW JUPITER MX 135 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
- MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
- MOTOR, HONDA CBR 150 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
- MOTOR, YAMAHA 2DP-R AVT SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.253.914

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.173.753.914

III. HUTANG Rp. 50.662.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.123.091.514



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.